

## PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN LEBAKSIU

Uripatul Muapipah <sup>1\*</sup>, Fatkhuri <sup>2</sup>

<sup>1</sup> STIES Putera Bangsa Tegal

<sup>2</sup> STIES Putera Bangsa Tegal

Corresponding email: [urftlmuaffh@gmail.com](mailto:urftlmuaffh@gmail.com), [fatkhuri906@gmail.com](mailto:fatkhuri906@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada aparatur desa di Kecamatan Lebaksiu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara sistem akuntansi keuangan daerah juga memberikan kontribusi positif. Kesimpulannya, penerapan kedua sistem tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

**Kata kunci:** Pengendalian Internal, Akuntansi Keuangan Daerah, Laporan Keuangan

**Abstract:** *This study aims to analyze the influence of the internal control system and the regional financial accounting system on the quality of village government financial reports. The research method used was quantitative with a survey approach. Data were collected through questionnaires distributed to village officials in Lebaksiu District. The results indicate that the internal control system has a significant impact on the quality of financial reports, while the regional financial accounting system also makes a positive contribution. In a conclusion, the implementation of both systems can improve the accountability and transparency of village financial management.*

**Keywords:** *Internal Control, Regional financial accounting, Financial Reports*

### PENDAHULUAN

Di era keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik, penyelenggaraan laporan keuangan pemerintah desa telah menjadi aspek penting dalam kegiatan pemerintahan lokal. Menurut Mardiasmo (2018), laporan keuangan yang baik harus dapat dibandingkan, mudah dipahami, dan relevan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemerintah desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan yang akurat dan mengelola keuangan secara efektif karena meningkatnya alokasi dana masyarakat. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan desa adalah keberadaan sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013) menyatakan bahwa SPI meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam administrasi keuangan desa, menjamin kepatuhan terhadap peraturan, dan membantu dalam pencegahan ketidakwajaran. Kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan lebih mungkin terjadi ketika pengendalian internal lemah..

Selain itu, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang sesuai dengan standar juga menjadi penentu dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Harun (2015) penerapan sistem akuntansi yang terstruktur, berbasis teknologi, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan memudahkan aparat desa dalam pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Tanpa sistem akuntansi yang sesuai, potensi kesalahan dan manipulasi data keuangan akan meningkat. Tetapi, dalam

praktiknya, banyak pemerintah desa yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem akuntansi yang benar akibat kurangnya pemahaman atau keterbatasan sumber daya manusia.

Sejumlah pemukiman di Kecamatan Lebaksiu, yang merupakan bagian dari Kabupaten Tegal, memiliki peran strategis penting bagi pertumbuhan wilayah tersebut. Penelitian mengenai pengaruh akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Lebaksiu sangat penting, karena proses pelaporan keuangan desa masih menghadapi sejumlah tantangan yang menunjukkan adanya masalah pada pelaksanaan sistem pengendalian internal dan akuntansi.

Secara geografis, Kecamatan Lebaksiu berada di bagian timur Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kecamatan Lebaksiu memiliki luas sekitar 4.298 hektare. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- di utara berbatasan dengan Kecamatan Adiwerna
- di selatan berbatasan dengan Kecamatan Balapulang
- di barat berbatasan dengan Kecamatan Pangkah
- dan di timur berbatasan dengan Kecamatan Bojong.

Kecamatan Lebaksiu terdiri dari 17 desa dengan kondisi topografi yang relatif datar hingga bergelombang. Sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan untuk pertanian, permukiman, dan kegiatan perdagangan. Letak geografis yang strategis karena dilalui oleh jalur utama penghubung Tegal–Purwokerto menjadikan Lebaksiu sebagai kawasan yang berkembang pesat dalam bidang ekonomi dan pemerintahan desa. Kondisi ini mendukung aktivitas administrasi dan keuangan desa yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam meningkatkan tanggung jawab dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan uang desa, serta menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam membimbing dan mengawasi pemerintahan desa.

## **LANDASAN TEORI**

### **Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Undang-Undang No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen dan seluruh karyawan dalam suatu organisasi untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien, laporan keuangan dapat dipercaya, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan dapat dijaga. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah prosedur yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen dan seluruh karyawan dalam suatu organisasi untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa laporan fiskal dapat dipercaya, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dapat ditegakkan, dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

### **Komponen – komponen Pengendalian Internal**

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013), SPI terdiri atas lima komponen, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Evaluasi risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Komunikasi dan informasi
5. Observasi

### **Tujuan Pengendalian Internal**

Arens, Elder, dan Beasley (2017) menyatakan bahwa tujuan sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Melindungi sumber daya perusahaan.
2. Memverifikasi keandalan dan ketepatan catatan akuntansi.
3. Meningkatkan efisiensi operasional.
4. Memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem akuntansi keuangan daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudi (2016), terdiri dari sejumlah subsistem, di mana setiap subsistem memuat prosedur, pedoman, alat, dan regulasi yang diwajibkan untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi keuangan. Setelah proses ini, informasi tersebut diolah menjadi berbagai laporan yang ditujukan untuk pemangku kepentingan, baik yang berasal dari dalam maupun luar pemerintah daerah, yang selanjutnya akan digunakan oleh mereka yang memerlukan informasi tersebut untuk mengambil keputusan terkait keuangan. Dalam konteks ini, informasi yang relevan dari sistem akuntansi keuangan daerah akan siap diakses oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Sistem akuntansi yang terdesentralisasi diterapkan guna mendistribusikan atau memindahkan otoritas dalam perencanaan, pemerintahan, administrasi, dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat regional. Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai suatu jaringan yang mencakup kebijakan, prosedur, dan pedoman yang dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, serta relevan. Laporan-laporan ini dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar pemerintah daerah, sebagai panduan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

### **Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Setidaknya terdapat empat prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah, menurut Halim (2012:84). Menteri Dalam Negeri kemudian menyempurnakan prosedur tersebut menjadi lima:

1. **Prosedur Akuntansi untuk Penerimaan Kas**  
Proses akuntansi penerimaan kas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan data keuangan guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terkait dengan penerimaan kas.
2. **Prosedur Akuntansi untuk Pengeluaran Kas**  
Data keuangan dicatat, dikategorikan, diringkas, dan dilaporkan sebagai bagian dari sistem akuntansi pengeluaran kas SKPD, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas.
3. **Prosedur Akuntansi Aset Tetap**  
Prosedur akuntansi aset tetap adalah serangkaian proses baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD atas perolehan hingga penyusutan atas aset yang dikuasai ataupun digunakan oleh SKPD.
4. **Prosedur Akuntansi Non-Tunai** Dari pencatatan dan peringkasan hingga pelaporan keuangan, frasa "prosedur akuntansi non-tunai" menggambarkan serangkaian proses yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan komputer.
5. **Penyajian Laporan Keuangan** Laporan keuangan disajikan untuk dua alasan: untuk menunjukkan akuntabilitas manajerial dan untuk memberikan informasi bagi pengambilan keputusan politik, sosial, dan ekonomi.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan daerah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bastian (2007:7), merupakan unsur dari tahap pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang menyajikan secara teratur informasi mengenai kondisi keuangan dari transaksi yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah daerah..

### **Tujuan Laporan Keuangan**

Secara umum, fungsi laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang penting bagi para pihak yang terkait dalam keputusan mengenai kinerja, status keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu lembaga. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan harus berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan berikut:

1. Menyediakan informasi yang penting bagi pengguna agar mereka dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan politik, sosial, dan ekonomi. Menunjukkan tanggung jawab atas pengelolaan dana yang diberikan kepada pemerintah.
2. Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk anggaran negara bagian dan daerah.
3. Menyajikan data mengenai kondisi keuangan, kinerja, arus kas, realisasi anggaran, dan perubahan ekuitas pemerintah.
5. Membuat administrasi pemerintahan lebih akuntabel dan transparan.

### **Karakteristik**

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menegaskan bahwa elemen kualitatif dalam laporan keuangan adalah tolok ukur yang harus diintegrasikan ke dalam data akuntansi untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk memastikan laporan keuangan daerah pemerintah memenuhi standar pelaporan yang dibutuhkan, ada empat karakteristik yang harus dipenuhi secara normatif:

1. Relevansi Laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Laporan tersebut juga memiliki nilai prediktif dan memberikan umpan balik yang tepat waktu dan lengkap.
2. Keandalan Penggunaan informasi ini dapat dicegah dari keterlambatan yang tidak perlu dalam laporan keuangan, dan dapat mencegah kesalahan material dan keakuratannya dapat diverifikasi.
3. Laporan keuangan yang sebanding harus dapat dibandingkan antara entitas, seperti SKPD atau wilayah, dan antar periode.
4. Dapat dipahami  
Informasi dalam laporan keuangan disajikan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pengguna.

### **METODE**

Dalam studi ini, pendekatan kuantitatif diterapkan. Tujuannya adalah untuk menguraikan hubungan sebab-akibat antara variabel tergantung (kualitas laporan keuangan dari pemerintah desa) dan variabel bebas (sistem akuntansi keuangan daerah serta sistem pengendalian internal). Metode ini digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis dan objektif bagaimana partisipasi masyarakat dan pemahaman literasi keuangan berdampak pada tingkat kesejahteraan warga di Desa Balapulung Wetan.

### **Populasi & Sampel**

Penelitian ini melibatkan aparatur pemerintah desa serta RT dan RW, total 38 orang. Metode sederhana untuk menghitung sampel probabilitas adalah random sampling. Untuk menghitung ukuran sampel, rumus Slovin digunakan dengan tingkat kesalahan (margin of error) 5%:  $n = N / (1 + N \times e^2)$

Dimana:

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi
- e = tingkat kesalahan (0,05)

$$n = 38 / (1 + 38 \times (0,05)^2) = 38 / (1 + 38 \times 0,0025) = 38 / (1 + 0,095) = 38 / 1,095 = 34,7 \approx 35 \text{ responden}$$

Berdasarkan perhitungan, pejabat RT dan RW terpilih serta 35 dari 38 pegawai pemerintahan desa merespons. Tabel angka acak digunakan untuk memilih responden secara acak, menjamin bahwa setiap orang dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

Usia		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	11.4	11.4	11.4
	2	5	14.3	14.3	25.7
	3	5	14.3	14.3	40.0
	4	13	37.1	37.1	77.1
	5	8	22.9	22.9	100.0
Total		35	100.0	100.0	

Mayoritas responden (37,1%) berusia di atas 41 tahun, menunjukkan dominasi kelompok usia dewasa matang. Hanya 22,9% responden berusia 31-35 tahun dan 14,3% berusia 36-40 tahun. Komposisi usia menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kedewasaan, pengalaman kerja, memiliki pemahaman yang kuat tentang akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal.

### Gender

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	20	57.1	57.1	57.1
	2	15	42.9	42.9	100.0
Total		35	100.0	100.0	

Hanya 42,9% orang yang menjawab perempuan, dan 57,1% orang yang menjawab laki-laki. Komposisi responden menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan bahwa data penelitian mewakili kedua gender secara proporsional.

### Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	11.4	11.4	11.4
	2	9	25.7	25.7	37.1

3	20	57.1	57.1	94.3
4	2	5.7	5.7	100.0
Total	35	100.0	100.0	

Di antara responden yang memiliki tingkat pendidikan menengah, mayoritas lulusan SMK (57,1%) dan SMA (25,7%). Pendidikan S1 hanya dimiliki oleh 11,4 persen responden. Struktur ini menunjukkan literasi yang cukup untuk memahami instrumen penelitian.

### UJI VALIDITAS

Validitas diuji menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment. Butir dianggap sah jika, pada tingkat signifikansi 5%, nilai r yang dihitung lebih tinggi daripada nilai r pada tabel dan signifikansinya kurang dari 0,05.

**Tabel 1. Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal**

VAR. Pengendalian Internal	r-hit	r-table	Sig	Keterangan
X1.1	.817**	.0,344	.<001	Valid
X1.2	.696**	.0,344	.<001	Valid
X1.3	.693**	.0,344	.<001	Valid
X1.4	.593**	.0,344	.<001	Valid
X1.5	.722**	.0,344	.<001	Valid

**Tabel 2. Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

VAR. Sistem Akuntansi Keuangan	r-hit	r-table	Sig	Keterangan
X2.1	.675**	.0,344	.<001	Valid
X2.2	.603**	.0,344	.<001	Valid
X2.3	.786**	.0,344	.<001	Valid
X2.4	.682**	.0,344	.<001	Valid
X2.5	.812**	.0,254	.<001	Valid

**Tabel 3. Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa**

VAR. Kualitas Laporan Keuangan	r-hit	r-table	Sig	Keterangan
Y.1	.645**	.0,344	.<001	Valid
Y.2	.666**	.0,344	.<001	Valid
Y.3	.618**	.0,344	.<001	Valid
Y.4	.854**	.0,344	.<001	Valid
Y.5	.433**	.0,344	.009	Valid

Analisis korelasi dilakukan pada 15 variabel (P1-P15) dengan sampel sebanyak 35 responden (N=38). Hasil menunjukkan variabel memiliki tingkat hubungan yang berbeda, dengan signifikansi pada tingkat 0.01 (\*\*\*) dan 0.05 (\*).

Dari lima item yang diuji, lima item (X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan X1.5) dinyatakan valid, dengan nilai r-hitung rata-rata 0,696-0,722. Setiap nilai melebihi r-tabel (0,344) dan signifikansi kurang dari 0,05.

**Tabel 4. Uji Reliabilitas**

Realiability	Cronbach's Alpha	N Item
X1	0,730	5
X2	0,748	5
Y	0,586	5

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) memperoleh nilai alfa Cronbach sebesar 0,730, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) mendapatkan nilai alfa 0,748, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Y) memiliki nilai alfa 0,586. Mengingat nilai alfa Cronbach untuk variabel X1 dan X2 melebihi angka 0,60, instrumen penelitian ini dianggap dapat diandalkan. Di sisi lain, nilai alfa untuk variabel Y hampir mencapai batas minimum 0,60.

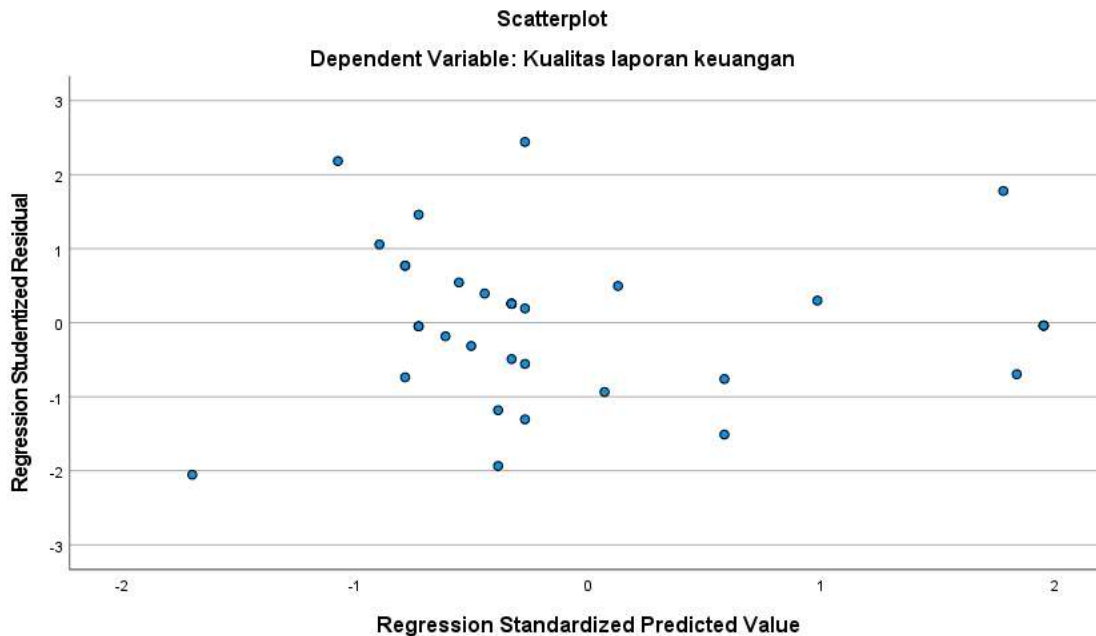
**Tabel 1. Uji Asumsi Klasik**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.31915727
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.103
	Negative	-.109
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Dengan menerapkan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov pada 35 data, analisis normalitas menunjukkan rata-rata residu sebanyak 0,000000 dan deviasi standar sebesar 1,319. Angka signifikansi (Asymptotic Sign 2-tailed) tercatat 0,200, sedangkan nilai statistik uji berada pada 0,109. Mengingat bahwa nilai signifikansi melebihi 0,05, dapat disimpulkan bahwa residu dari model regresi mengikuti pola distribusi normal.

**Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas**



Hasil dari pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dengan memanfaatkan grafik scatterplot yang memperlihatkan nilai prediksi terstandarisasi serta residual terstandarisasi menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik data tidak mengikuti pola yang spesifik. Asumsi klasik mengenai kesetaraan varians residual telah terpenuhi, sebab bukti ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menghadapi masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 3. Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	75.120	2	37.560	20.314	.000 <sup>b</sup>
	Residual	59.166	32	1.849		
	Total	134.286	34			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem pengendalian internal

Penelitian mencatat nilai F yang dihitung sebesar 20,314 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa mutu Laporan Pemerintah Desa dipengaruhi dengan cara yang proporsional oleh komponen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal.

**Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.748 <sup>a</sup>	.559	.532		1.360

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Internal

Keterkaitan yang penting antara Pengendalian Internal, Akuntansi Keuangan dari Pemerintah Daerah, dan Mutu Laporan Keuangan Desa terlihat melalui hasil pengujian koefisien determinasi, yang menunjukkan angka R sebesar 0,748. Kedua elemen independen ini memaparkan 55,9% perubahan dalam Mutu Laporan Keuangan Desa, sementara variabel independen lainnya menyumbang sisanya sebesar 44,1%, berdasarkan nilai R Square yang tercatat adalah 0,559.

## **Pembahasan**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah desa Kecamatan Lebaksiu. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen kedua mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan, dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Selain itu, berdasarkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,559, sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah bertanggung jawab atas 55,9% perbedaan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Faktor lain, seperti kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan komitmen organisasi, menyumbang 44,1% dari perbedaan tersebut.

Semua pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki nilai  $r$ -hitung yang lebih besar dari  $r$ -tabel dan tingkat signifikansi di bawah 0,05, menurut hasil uji reliabilitas dan validitas. Variabel sistem pengendalian internal (0,730) dan sistem akuntansi keuangan daerah (0,748) memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas batas minimum 0,60, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian dapat diandalkan. Artinya, indikator yang digunakan secara konsisten untuk mengevaluasi persepsi responden terhadap kedua variabel ini. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05. Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas, dengan pola sebaran titik yang acak. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis.

Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh COSO (2013) dan Arens et al. (2017) bahwa sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan memastikan keandalan data akuntansi. Pengendalian internal sangat penting dalam pemerintahan desa untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah yang berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memudahkan aparat desa untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan secara tertib dan transparan. Kedua sistem ini membuat laporan keuangan yang dihasilkan lebih relevan, kredibel, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem pengendalian internal dan akuntansi keuangan daerah yang lebih baik terkait dengan laporan keuangan pemerintah desa yang lebih baik. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Khasanah dan Puspitasari (2022) dan Sukmaningrum dan Widyastuti (2018), yang menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sektor publik meningkat sebagai hasil dari pengendalian internal yang efektif dan penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Akibatnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian internal dan akuntansi daerah, merupakan langkah penting menuju tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa dua komponen utama—Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)—berpengaruh besar pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Pengendalian internal yang efektif telah ditunjukkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan mencegah kesalahan, memastikan kepatuhan hukum, dan meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan. Meskipun demikian, menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan memungkinkan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis, jelas, dan akuntabel. Kedua variabel ini berkontribusi secara bersamaan sebesar 55,9% terhadap variasi kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Variabel lain, seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan TI, dan komitmen organisasi, memberikan kontribusi sebesar 44,1%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (16th ed.). Pearson Education.
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- BPKP. (2019). *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- COSO. (2013). *Internal Control—Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Harun. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 1–23.
- Khasanah, I., & Puspitasari, E. (2022). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(1), 1–14.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). ANDI.
- Nordiawan, D. (2015). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Sekretariat Negara.
- Rahmawati, R., & Suryani, S. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 12–25.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, R. (2019). Determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(2), 101–115.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmaningrum, D., & Widyastuti, T. (2018). Pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 245–259.
- Winarno, W. W. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. UPP STIM YKPN.